

RENCANA KERJA

TAHUN 2024



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KOTA TERNATE**

TERNATE
Kota Rempah



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tahun 2024 sebagai upaya mendukung kebijakan umum Pemerintah Kota Ternate.

Renja Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate ini disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Disisi lain adanya perkembangan dinamika dan perubahan yang sangat cepat, memerlukan respon dan penyesuaian dalam menyusun program prioritas. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) maka penyusunan RENJA mesti berangkat dari kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam koridor implementasi visi Ternate Andalan. Oleh karena itu, pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan serta masukan dari berbagai pihak sangat bermanfaat untuk menyempurnakan konsepsi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.

Kami berharap dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan yang dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.

Ternate, Maret 2023

**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ternate**



DR. BAHTIAR TENG
Pembina Utama Muda
Nip. 19660502 199203 1 016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i	
Daftar Isi.....	ii	
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA.....	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja.....	7
	2.2 Analisis Kinerja.....	7
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	9
	2.4 Review Terhadap Renja 2022.....	11
	2.5 Telaah Atas Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	11
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	12
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renja.....	12
	3.2 Program dan Kegiatan.....	13
BAB IV	PENUTUP.....	15
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan penjabaran operasional dari dokumen Renstra SKPD yang telah disusun melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Secara khusus Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD.

Rencana kerja menjadi instrumen penting bagi OPD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam pemecahan masalah. Renja OPD secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja masing-masing OPD dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Renja OPD merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan OPD, apa yang hendak dicapai pada masa satu tahun, serta bagaimana mencapainya.

Secara umum fungsi Renja OPD untuk menjawab pertanyaan bagaimana bentuk pelayanan OPD akan dilaksanakan dan apa yang hendak dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah atau tindakan teknis apa saja yang perlu dilakukan OPD agar program berjalan secara efektif. Renja OPD berfungsi untuk menjabarkan tujuan, strategi dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, kemudian menerjemahkan secara operasional, sistematis, dan terpadu kedalam

program dan kegiatan prioritas, indikator sebagai tolak ukur kinerja dan indikasi pendanaan. Dalam upaya mendorong sinkronisasi dan optimalisasi dalam pelaksanaannya, proses penyusunan dokumen renja OPD membutuhkan kapasitas kelembagaan dan komitmen dari semua *Stakeholder* untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan OPD melalui proses yang transparan, demokratis dan akuntabel.

Secara Khusus Renja OPD memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan secara realistis, konsisten dengan tujuan dan fungsi OPD dan dilaksanakan dalam kerangka rencana jangka pendek.
- b. Menetapkan tujuan, sasaran dan program terkait kebutuhan peningkatan pelayanan OPD agar lebih dipahami serta bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh OPD.
- d. Memastikan ketersediaan dan kesiapan sumber daya serta dana pembangunan daerah yang diarahkan untuk menangani program prioritas pelayanan OPD.
- e. Menyediakan dasar untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan keinerja selama satu tahun pelaksanaan.
- f. Mendorong kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan.
- g. Merumuskan prioritas, indikator dan langkah-langkah taktis yang jelas untuk mencapai tujuan.
- h. Salah satu perangkat penting dalam mengevaluasi kinerja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Berikut beberapa peraturan pokok yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renja OPD dalam kerangka perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ternate Tahun 2024 disusun dengan merujuk pada sejumlah peraturan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - g. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
 - h. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada. Rencana Program dan Kegiatan prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

Tujuan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Berisikan sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, tantangan dan peluang dan formulasi isu-isu penting SKPD

2.4 Review Terhadap Renja 2021

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan-catatan penting

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program tahun lalu adalah program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate pada tahun 2022. Program-program tersebut dilaksanakan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate Tahun 2021-2026. Berdasarkan Renstra tersebut, maka tahun 2022 telah dilaksanakan 6 program yang seluruhnya merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dari enam program tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate telah mampu diwujudkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate pada tahun 2022 berdasarkan ***Renstra DPMPSTP Kota Ternate Tahun 2021-2026***. Lebih lengkap dapat dilihat pada tabel: 2.1 lampiran renja ini.

2.2. Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate

Analisis Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate sesuai Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel

: 2.2 lampiran renja ini. Dibawah ini dapat dilihat gambar pencapaian kinerja pelayanan melalui:

1. Survey Kepuasan Masyarakat



(Sumber data Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan)

2. Nilai Realisasi Investasi

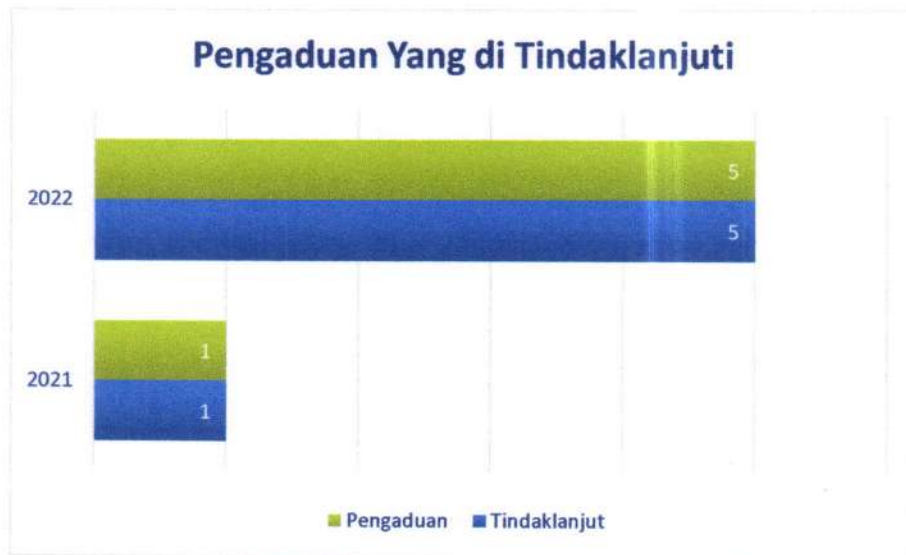


(Sumber data: Bidang Penanaman Modal)

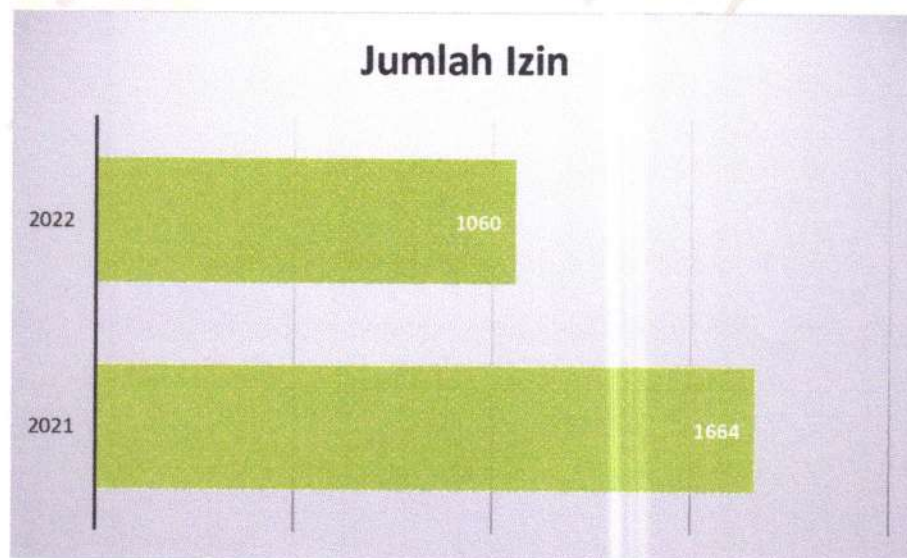
3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja



4. Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti



5. Izin yang Diterbitkan



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu timbul permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Ternate dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 4B Tahun 2020 yaitu:

1. Faktor Internal :

1. Tingginya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan;
2. Adanya kesempatan mengikuti program pendidikan dan pelatihan pelayanan publik dari lembaga terkait;
3. Penguatan Urusan Penanaman Modal dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
4. Belum tersedianya database sebagai dasar dalam proses penyelenggaraan pelayanan perizinan;
4. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan perizinan;
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan.

2. Faktor Eksternal :

1. Apresiasi masyarakat terhadap pola dan model penyelenggaraan pelayanan DPMPTSP cukup tinggi;
2. Respon Tim Teknis Pelayanan Perizinan masih lemah;
3. Pelimpahan kewenangan perizinan urusan penanaman modal dan PTSP belum sepenuhnya diserahkan;
4. Belum terlaksananya investor PMA/PMDN yang melakukan pelaporan secara berkala.
5. Belum optimalnya penataan kawasan perkotaan sesuai dengan perda Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dengan adanya berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Ternate, maka dapat ditentukan isu-isu penting yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Ternate sebagai berikut :

1. Kurangnya promosi potensi investasi daerah;
2. Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu yang belum optimal;
3. Belum memadainya kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggara;
4. Sarana dan prasarana kurang memadai;
5. Kurangnya dukungan dan sinergitas dari PD lain;

6. Data penunjang terbatas/kurangnya basis data;

Dengan mengelaborasi isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif dan bersinergi dengan *Visi dan Misi Walikota Ternate* serta Visi dan Misi DPMPTSP Kota Ternate khususnya.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate dalam penyelenggaraan pelayanan sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan seperti :

- a. Loker/ ruang pengajuan permohonan;
- b. Tempat/ruang pemrosesan berkas;
- c. Tempat/ruang pembayaran;
- d. Tempat/ruang penyerahan dokumen;
- e. Ruang Informasi
- f. Ruang Laktasi dan Bermain Anak

Selain itu, sumber daya manusia yang bertugas telah memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang tugas pelayanan perizinan dan non perizinan. Namun karena meningkatnya permohonan perizinan dan non perizinan maka masyarakat masih merasakan lambatnya proses penerbitan izin dan non izin pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Kegiatan review terhadap evaluasi pelaksanaan renja lalu dan pencapaian kinerja Renstra OPD ditujukan untuk mengukur sejauh mana kapasitas organisasi dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Review pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate dapat dilihat pada tabel 2.4 lampiran renja ini.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPMPTSP Kota Ternate dalam melaksanakan fungsi pelayanannya secara langsung dengan masyarakat, baik secara perorangan maupun secara organisasi. Oleh karena itu sampai dengan saat ini DPMPTSP Kota Ternate belum pernah mendapatkan usulan program atau

kegiatan dari para stakeholders, baik melalui Forum RKPD maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kota Ternate Tahun 2023.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja DPMPTSP Kota Ternate adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada.

Sebelum merumuskan tujuan dan sasaran Rencana Kerja DPMPTSP Kota Ternate Tahun 2024, maka terlebih dahulu dikemukakan Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Ternate yang termuat dalam Rencana Strategis 2021-2026. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran berdasarkan Renstra 2021-2026 yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Kota Ternate Tahun 2024, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1

Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Ternate

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan nonperizinan serta daya saing daerah dalam mendukung iklim investasi daerah	Meningkatnya percepatan penyelesaian pelayanan perizinan dan nonperizinan
	Meningkatkan Daya Saing daerah dalam mendukung investasi

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu satu tahunan maka DPMPTSP Kota Ternate menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup :

1. Terlaksananya pengembangan dan realisasi penanaman modal daerah
2. Tersedianyanya data dan informasi serta kebijakan pengembangan cluster yang mendukung iklim investasi
3. Terciptanya peluang berinvestasi di daerah

4. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perizinan untuk mendukung daya saing daerah serta menciptakan iklim investasi usaha yang baik
5. Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam mendukung kinerja pelayanan
6. Terciptanya sistem pelayanan terpadu satu pintu dalam mengoptimalkan layanan cepat, tepat dan efektif
7. Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung terciptanya kinerja pelayanan
8. Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur dalam penyelenggaraan administratif dan pelayanan publik
9. Semakin rendahnya jumlah pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk Rencana Kerja Tahun 2022 ini dapat dilihat evaluasi progress pencapaian tujuan dan sasaran dikarenakan realisasi pencapaian kinerja pada lampiran renja ini. Target pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Ternate Tahun 2022 masih sesuai dengan kondisi nyata dan realistik sesuai dengan kebutuhan terhadap pelayanan masyarakat dan tetap berpedoman pada Renstra DPMPTSP Kota Ternate. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Tahun 2022, disajikan pada:

Tabel 3.1.2

No	Tujuan	Sasaran Strategis	IKU	Target Kinerja Sasaran tahun 2022
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan nonperizinan serta daya saing daerah dalam mendukung iklim investasi daerah	Meningkatnya percepatan penyelesaian pelayanan perizinan dan nonperizinan	IKM Pelayanan Perizinan Berusaha	B
2		Meningkatkan Daya Saing daerah dalam mendukung investasi	Nilai Realisasi Investasi	184,800,000,000
			Rasio Daya Scrap Tenaga Kerja	7

3.2. Program dan Kegiatan

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diimplementasikan dalam sasaran program, yaitu:

1. Meningkatkan promosi potensi invetasi daerah;

2. Meningkatnya pelayanan terpadu satu pintu;
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas aparatur penyelenggara;
4. Meningkatnya sarana dan prasarana yang representatif;
5. Meningkatnya dukungan dan sinergitas dari PD lain;
6. Meningkatnya data penunjang /basis data.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate maka program yang akan dilaksanakan tahun 2024 adalah 6 program 13 kegiatan dan 37 sub kegiatan, yang mana semua program merupakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Penjabaran Program/kegiatan yang akan dilaksanakan dan didukung dengan pagu Indikatif berdasarkan RPJMD Kota Ternate 2016-2021 sebagai dasar penyusunan Rencana kerja Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 2.5

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) OPD menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berkelanjutan (sustainable development). RENJA OPD juga merupakan sarana untuk mengakomodir isu-isu strategis/permasalahan pembangunan yang difokuskan penanganannya serta menjadi kebutuhan masyarakat dan daerah.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate pada Tahun 2024, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. RENJA juga memuat tingkat capaian, serta kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun sebelumnya, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan serta penyusunan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

RENJA juga sebagai dokumen action plan memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate serta mendukung arahan prioritas pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Ternate Tahun 2024.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPTSP dan Pencapaian Renstra DPMPTSP s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan)
KOTA TERNATE

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DPMPTSP) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TahunLalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja DPMPTSP) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DPMPTSP s/d Tahun 2023	
									Target Renja DPMPTSP Tahun 2022	Realisasi Renja DPMPTSP Tahun2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	18	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah								
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (persen)								
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	15	3	3	3	100%	3	9	60%
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA	10	2	2	2	100%	2	6	60%
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	10	2	2	2	100%	2	6	60%
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (persen)								
2	18	01	2.05	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN selama setahun	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2	18	01	2.05	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semester yang disusun	60	12	12	12	100%	12	36	60%
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian PD								
2	18	01	2.05		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	jumlah pakaian dinas	100	0	100	0	0%	0	0	0%
2	18	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah SKP yang tepat sasaran	152	40	40	40	100%	31	111	73%
2	18	01	2.05	06	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah sertifikat yang diperoleh	40	0	5	2	40%	0	2	5%
2	18	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang	5	1	1	1	100%	1	3	60%
2	18	01	2.05	11	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	15	3	3	3	100%	0	6	40%
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum PD								
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibutuhkan	60	20	20	20	100%	10	50	83%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DPMPTSP) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja DPMPTSP) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DPMPTSP s/d Tahun 2023	
					Target Renja DPMPTSP Tahun 2022	Realisasi Renja DPMPTSP Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 18 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kantor yg diperlukan	60	20	20	20	100%	10	50	83%
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36	12	12	12	100%	2	26	72%
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	30	10	10	10	100%	10	30	100%
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar/koran,majalah dan peraturan perundang-undangan yg diperlukan	30	10	10	10	100%	3	23	77%
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kordinasi dan Konsultasi SKPD	75	25	25	25	100%	20	70	93%
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2 18 01 2.07 09	Pengadaan Meubel	Jumlah Pengadaan Mebel	9	3	3	3	100%	0	6	67%
2 18 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diperlukan	3	1	1	1	100%	1	3	100%
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Jasa Internet dan Rekening PIDAM, Listrik (bulan)	1	0	1	0	0%	0	0	0%
2 18 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	90	30	30	30	100%	30	90	100%
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya gaji FFT dan Honor lainnya selama setahun (bulan)	12	12	12	12	100%	12	36	300%
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Palak	Jumlah unit kendaraan kantor yang diperbolehkan perawatan	3	1	1	1	100%	1	3	100%
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	3	3	3	100%	3	9	300%
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	2	0	1	1	100%	1	2	100%
2 18 02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi								
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang	Jumlah Rancangan Perundang-undangan yang disusun								
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan yang tersusun	1	0	1	0	0%	1	1	100%

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DPMPTSP) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan TahunLalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja DPMPTSP) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DPMPTSP s/d Tahun 2023	
									Target Renja DPMPTSP Tahun 2022	Realisas Renja DPMPTSP Tahun2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberiaan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanamann	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan yang tersusun	1	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0%
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	Jumlah dokumen potensi dan peluang usaha								
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	Jumlah dokumen RUPM yang tersusun	1	1	1	0	0%	0	1	100%
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab/Kota	Jumlah updating data prospek investasi	1	0	1	1	100%	1	2	200%
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tingkat Penanaman Modal								
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang	Jumlah minat investasi								
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah laporan strategis promosi penanaman modal	3	1	1	1	100%	0	2	67%
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Jumlah pelaksanaan promosi penanaman modal daerah kota	3	0	2	0	0%	1	1	33%
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan PM								
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dihidangi	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP								
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis	Jumlah izin yang diterbitkan sesuai SOP	3000	2086	1000	1664	166%	1000	4750	158%
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non	Jumlah Laporan Pemantauan Izin	3	0	1	0	0%	1	1	33%
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan	1. Jumlah Responden SKM 2. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	240	80	80	80	100%	80	240	100%
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan Yang Dihadapi Pelaku Usaha								
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota								
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan dilakukan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	35	8	14	14	100%	13	35	100%
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan dilakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	428	100	215	215	100%	213	528	123%
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	35	8	14	14	100%	13	35	100%
2	18	06			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya Data & Informasi Layanan Perizinan dan Nonperizinan								
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Layanan Perizinan dan Nonperizinan								

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DPMPTSP) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja DPMPTSP) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DPMPTSP s/d Tahun 2023	
					Target Renja DPMPTSP Tahun 2022	Realisasi Renja DPMPTSP Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem	1. Jumlah data perizinan yang terinput dalam aplikasi 2. Jumlah/jenis Penyebaran informasi	15	3	5	5	100%	5	13	87%

Ternate, Maret 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Berpadu Satu Pintu
Kota Ternate

Dr. BAHTIAR TENG
Penyelia Utama Muda
Nip. 19560502 199203 1 016

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TERNATE

NO	Indikator	SPM/S tandar Nasion	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian	Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	12	13
1	IKM Pelayanan Perizinan Berusaha		Keberadaan survey kepuasan masyarakat	B	B	B	B	A	A	89 (A)	89.2 (A)	B	B	
2	Nilai Realisasi Investasi		Nilai Investasi Berskala Nasional	168,000,000,000	184,800,000,000	203,280,000,000	223,608,000,000	245,968,800,000	270,565,680,000	285,435,360,150	446,815,989,566	729,382,421,368	1,239,147,795,662	
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		Jumlah Tenaga Kerja Yang Bekerja di Perusahaan	5	7	9	12	15	20	9	8	11	12	

Ternate, Maret 2023
 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Ternate

[Signature]
DR. BARTIAR TENG
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19660502 199203 1 016

Tabel. 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KOTA TERNATE

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor Rekening					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
					Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Catatan Penting
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								14,344,514,417					14,344,514,417	
2	18	01				Persentase Capaian Kinerja		11,937,514,417	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Kinerja		11,937,514,417	
2	18	01	2.01			Tingkat Konsistensi Perencanaan		65,000,000	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tingkat Konsistensi Perencanaan		65,000,000	
2	18	01	2.01	01	Kota Ternate	Jumlah Jenis dokumen	2 dokumen	15,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Ternate	Jumlah jenis dokumen	2 dokumen	15,000,000	
2	18	01	2.01	02	Kota Ternate	Jumlah dokumen RKA	2 dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Kota Ternate	Jumlah dokumen RKA	2 dokumen	15,000,000	
2	18	01	2.01	06	Kota Ternate	Jumlah laporan yang disusun	2 dokumen	35,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kota Ternate	Jumlah laporan yang disusun	2 dokumen	35,000,000	
2	18	01	2.02			Tingkat Realisasi Pelaksanaan		4,544,793,417	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi Pelaksanaan		4,544,793,417	
2	18	01	2.05	01	Kota Ternate	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	4,529,793,417	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Ternate	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	4,529,793,417	
2	18	01	2.05	07	Kota Ternate	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester	Kota Ternate	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	15,000,000	
2	18	01	2.05			Persentase Penyelenggaraan		697,750,000	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah		Persentase Penyelenggaraan		697,750,000	
2	18	01	2.05		Kota Ternate	jumlah pakaian dinas	100 Steel	57,750,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Kota Ternate	jumlah pakaian dinas	100 Steel	57,750,000	
2	18	01	2.05	05	Kota Ternate	Jumlah SKP yang tepat sasaran	40 ASN	15,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Ternate	Jumlah SKP yang tepat sasaran	40 ASN	15,000,000	
2	18	01	2.05	06	Kota Ternate	Jumlah sertifikat yang diperoleh	40 ASN	350,000,000	Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Ternate	Jumlah sertifikat yang diperoleh	40 ASN	350,000,000	
2	18	01	2.05	10	Kota Ternate	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang	1 Kali	175,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Ternate	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang	1 Kali	175,000,000	
2	18	01	2.05	11	Kota Ternate	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	5 Orang	100,000,000	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Ternate	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	5 Orang	100,000,000	
2	18	01	2.06			Persentase Penyelenggaraan		660,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyelenggaraan		660,000,000	
2	18	01	2.06	01	Kota Ternate	Jumlah komponen instalasi listrik yang	20 Jenis	25,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Ternate	Jumlah komponen instalasi listrik yang	20 Jenis	25,000,000	
2	18	01	2.06	03	Kota Ternate	Jumlah Peralatan Kantor yg diperlukan	20 Jenis	25,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Ternate	Jumlah Peralatan Kantor yg diperlukan	20 Jenis	25,000,000	
2	18	01	2.06	04	Kota Ternate	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik	2 Jenis	50,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Ternate	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik	2 Jenis	50,000,000	
2	18	01	2.06	05	Kota Ternate	Jumlah Barang Cetakan dan	3 Jenis	150,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Ternate	Jumlah Barang Cetakan dan	3 Jenis	150,000,000	
2	18	01	2.06	06	Kota Ternate	Jumlah surat kabar/koran,majalah	10 exmplar	60,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Ternate	Jumlah surat kabar/koran,majalah	10 exmplar	60,000,000	
2	18	01	2.06	09	Kota Ternate	Jumlah Kordinasi dan Konsultasi SKPD Pegawai	50	350,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Ternate	Jumlah Kordinasi dan Konsultasi SKPD Pegawai	50	350,000,000	
2	18	01	2.07			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		600,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		600,000,000	

Nomor Rekening					Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
						Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	18	01	2.07	09	Pengadaan Meubel	Kota Ternate	Jumlah Pengadaan Mebel	3 Jenis	250,000,000	Pengadaan Meubel	Kota Ternate	Jumlah Pengadaan Mebel	3 Jenis	250,000,000	
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Ternate	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	3 Jenis	350,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Ternate	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	3 Jenis	350,000,000	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		751,680,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		751,680,000	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Ternate	Pembayaran Jasa Internet dan	1 Tahun	20,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Ternate	Pembayaran Jasa Internet dan	1 Tahun	20,000,000	
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Ternate	Jumlah Jasa Peralatan dan	30 Jenis	100,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Ternate	Jumlah Jasa Peralatan dan	30 Jenis	100,000,000	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Ternate	Terpenuhinya gaji PTT dan Honor	1 Tahun	631,680,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Ternate	Terpenuhinya gaji PTT dan Honor	1 Tahun	631,680,000	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyelenggaraan		4,618,291,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase Penyelenggaraan		4,618,291,000	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan/Perorangan	Kota Ternate	Jumlah unit kendaraan kantor	1 Tahun	100,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan/Perorangan	Kota Ternate	Jumlah unit kendaraan kantor	1 Tahun	100,000,000	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Ternate	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3 Jenis	30,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Ternate	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3 Jenis	30,000,000	
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Lainnya	Kota Ternate	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Bangunan	4,488,291,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Lainnya	Kota Ternate	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Bangunan	4,488,291,000	
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase Peningkatan	60	400,000,000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Persentase Peningkatan	60	400,000,000	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang PM yang Menjadi Kewenangan		Jumlah Rancangan Perundang-undangan	1 dok	200,000,000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang PM yang Menjadi Kewenangan		Jumlah Rancangan Perundang-undangan	1 dok	200,000,000	
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan	Kota Ternate	Jumlah dokumen peraturan perundang	1 dok	100,000,000	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan	Kota Ternate	Jumlah dokumen peraturan perundang	1 dok	100,000,000	
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberiaan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	Kota Ternate	Jumlah dokumen peraturan perundang	1 dok	100,000,000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberiaan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan	Kota Ternate	Jumlah dokumen peraturan perundang	1 dok	100,000,000	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota		Jumlah dokumen potensi dan peluang	1 Peta	200,000,000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota		Jumlah dokumen potensi dan peluang	1 Peta	200,000,000	
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Kota Ternate	Jumlah dokumen RUPM yang tersusun	1 Dok	100,000,000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Kota Ternate	Jumlah dokumen RUPM yang tersusun	1 Dok	100,000,000	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab/Kota	Kota Ternate	Jumlah updating data prospek investasi	1 dok	100,000,000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab/Kota	Kota Ternate	Jumlah updating data prospek investasi	1 dok	100,000,000	
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal		Persentase Tingkat Penanaman Modal	55	450,000,000	Program Promosi Penanaman Modal		Persentase Tingkat Penanaman Modal	55	450,000,000	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah		Jumlah minat Investasi		450,000,000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan		Jumlah minat Investasi		450,000,000	
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kota Ternate	Jumlah laporan strategis promosi	1 Lap	100,000,000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kota Ternate	Jumlah laporan strategis promosi	1 Lap	100,000,000	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Kota Ternate	Jumlah pelaksanaan promosi penanaman	2 Kali	350,000,000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Kota Ternate	Jumlah pelaksanaan promosi penanaman	2 Kali	350,000,000	
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal		Nilai Indeks Kepuasan	3.5 dari skala 4	470,000,000	Program Pelayanan Penanaman Modal		Nilai Indeks Kepuasan	3.5 dari skala 4	470,000,000	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang		Persentase Penyelesaian		470,000,000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang		Persentase Penyelesaian		470,000,000	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan	Kota Ternate	Jumlah izin yang diterbitkan sesuai	1000	200,000,000	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan	Kota Ternate	Jumlah izin yang diterbitkan sesuai	1000	200,000,000	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman	Kota Ternate	Jumlah Laporan Pemantauan Izin	12 Lap	70,000,000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman	Kota Ternate	Jumlah Laporan Pemantauan Izin	12 Lap	70,000,000	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kota Ternate	1. Jumlah Responden SKM 2. Persentase pengaduan yang	300 responden & 80% pengaduan	200,000,000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kota Ternate	1. Jumlah Responden SKM 2. Persentase pengaduan yang	300 responden & 80% pengaduan	200,000,000	

Nomor Rekening					Program/Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/Kegiatan	Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan Penting
						Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian	45	687,000,000	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian	45	687,000,000	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah		Jumlah Laporan Pengendalian		687,000,000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan		Jumlah Laporan Pengendalian		687,000,000	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Ternate	Jumlah Perusahaan dilakukan	8 Proyek	200,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Ternate	Jumlah Perusahaan dilakukan	8 Proyek	200,000,000	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Ternate	Jumlah Perusahaan dilakukan pembinaan	215 Pelaku Usaha	287,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Ternate	Jumlah Perusahaan dilakukan pembinaan	215 Pelaku Usaha	287,000,000	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Ternate	Jumlah Perusahaan dilakukan	14 Pelaku Usaha	200,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kota Ternate	Jumlah Perusahaan dilakukan	14 Pelaku Usaha	200,000,000	
2	18	06			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Tersedianya Data & Informasi Layanan		400,000,000	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Tersedianya Data & Informasi Layanan		400,000,000	
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang		Persentase Ketersediaan Data		400,000,000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang		Persentase Ketersediaan Data		400,000,000	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Kota Ternate	1. Jumlah data perizinan yang 2. Jumlah/jenis Penyebaran	5 Jenis Data	400,000,000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	Kota Ternate	1. Jumlah data perizinan yang 2. Jumlah/jenis Penyebaran	5 Jenis Data	400,000,000	

Ternate, Maret 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ternate


Drs. BAHYAR TENG
Pemimpin Utama Muda
Nip. 19660502 199203 1 016

TABEL 2.5
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
KOTA TERNATE

Perangkat Daerah : DPMPTSP Kota Ternate

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH									6,804,307,008				11,121,473,417
2	18	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah		100	5,531,907,008			100	9,051,473,417
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah (persen)			65,000,000				90,000,000
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Ternate	2 dokumen	10,000,000	DAU		2 dokumen	20,000,000
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA	Kota Ternate	2 dokumen	10,000,000	DAU		2 dokumen	20,000,000
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun	Kota Ternate	2 dokumen	10,000,000	DAU		2 dokumen	50,000,000
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang disusun	Kota Ternate	2 dokumen	35,000,000	DAU		2 dokumen	50,000,000
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (persen)			3,804,072,928				4,529,793,417
2	18	01	2.05	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN selama setahun (bulan)	Kota Ternate	12 Bulan	3,804,072,928	DAU		12 Bulan	4,529,793,417
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian PD			165,000,000				220,000,000
2	18	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah SKP yang tepat sasaran	Kota Ternate	40 ASN	15,000,000	DAU		40 ASN	20,000,000
2	18	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan/diikuti	Kota Ternate	1 Kali	150,000,000	DAU		1 Kali	200,000,000
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum PD			620,524,080				1,115,000,000
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang dibutuhkan	Kota Ternate	20 Jenis	25,000,000	DAU		20 Jenis	30,000,000
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Kota Ternate	20 Jenis	150,000,000	DAU		20 Jenis	35,000,000
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Kantor yg diperlukan	Kota Ternate	20 Jenis	20,000,000	DAU		20 Jenis	35,000,000
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Ternate	2 Jenis	50,000,000	DAU		2 Jenis	75,000,000
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Ternate	3 Jenis	50,000,000	DAU		3 Jenis	200,000,000
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar/koran,majalah dan peraturan perundang-undangan yg diperlukan	Kota Ternate	10 exemplar	75,524,080	DAU		10 exemplar	75,000,000
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Ternate	50 Pegawai	250,000,000	DAU		50 Pegawai	700,000,000

Kode				Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		200,000,000				500,000,000
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang di butuhkan	Kota Ternate	3 Jenis	200,000,000	DAU	3 Jenis	500,000,000
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		702,800,000				631,680,000
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya gaji PTT dan Honor lainnya selama setahun (bulan)	Kota Ternate	1 Tahun	702,800,000	DAU	1 Tahun	631,680,000
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		174,510,000				345,000,000
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan kantor yang memperboleah perawatan	Kota Ternate	1 Tahun	43,230,000	DAU	1 Tahun	150,000,000
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah unit kendaraan kantor yang memperboleah perawatan	Kota Ternate	1 Tahun	11,280,000	DAU	1 Tahun	150,000,000
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Ternate	3 Jenis	20,000,000	DAU	3 Jenis	45,000,000
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	Kota Ternate	1 Bangunan	100,000,000	DAU	1 Bangunan	150,000,000
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi		60	100,000,000		60	250,000,000
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang PM yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Rancangan Perundang-undangan yang disusun		1 dok	50,000,000		1 dok	100,000,000
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan yang tersusun	Kota Ternate	1 dok	50,000,000	DAU	1 dok	100,000,000
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	Jumlah dokumen potensi dan peluang usaha		1 Peta	50,000,000		1 Peta	150,000,000
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kab/Kota	Jumlah updating data prospek investasi	Kota Ternate	1 dok	50,000,000	DAU	1 dok	150,000,000
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tingkat Penanaman Modal		55	50,000,000		55	400,000,000
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah minat investasi			50,000,000			400,000,000
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi penanaman modal daerah kota	Kota Ternate	1 Kali	50,000,000	DAU	2 Kali	400,000,000
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan PM		3.5 dari skala 4	305,000,000		3.5 dari skala 4	470,000,000
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP			305,000,000			470,000,000

Kode					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah izin yang diterbitkan sesuai SOP	Kota Ternate	1000	101,000,000	DAU		1000	200,000,000
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Pemantauan Izin	Kota Ternate	12 Lap	51,000,000	DAU		12 Lap	70,000,000
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan	1. Jumlah Responden SKM 2. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Kota Ternate	300 responden & 80% pengaduan	151,000,000	DAU		300 responden & 80% pengaduan	200,000,000
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan Yang Dihadapi Pelaku Usaha		45	417,400,000			45	500,000,000
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota			417,400,000				500,000,000
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan dilakukan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Kota Ternate	215 Pelaku Usaha	298,448,400	DAU/DAK		215 Pelaku Usaha	300,000,000
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kota Ternate	14 Pelaku Usaha	126,951,600	DAU/DAK		14 Pelaku Usaha	200,000,000
2	18	06			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tersedianya Data & Informasi Layanan Perizinan dan Nonperizinan			400,000,000				450,000,000
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Layanan Perizinan dan Nonperizinan			400,000,000				450,000,000
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara	1. Jumlah data perizinan yang terinput dalam aplikasi 2. Jumlah/jenis Penyebaran informasi	Kota Ternate	5 Jenis Data	400,000,000	DAU		5 Jenis Data	450,000,000

Ternate, Maret 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Ternate


DESAH TIAR TENG
Pemula Utama Muda
Nip. 19660502 199203 1 016